



PERATURAN NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 05 TAHUN 2018

Tanggal : 11 Oktober 2018



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI
(RPJM)
TAHUN 2018 - 2024**

RPJM NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA 2018-2024



Visi

” Mewujudkan masyarakat Nagari Tluk Kualo Inderapura yang mandiri, agamais,berbudaya dan sejahtera, berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”

PEMERINTAHAN NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN 2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) sebagai upaya mengintegrasikan pengelolaan pembangunan partisipatif dalam sistem reguler (Musrenbang), serta mendorong penyelarasan perencanaan teknokratis, politis dengan partisipatif, pada dasarnya memiliki dua agenda besar: peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan pemerintahan lokal dalam penyelenggaraan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.

P2SPP memberikan tekanan pada aspek penguatan pemerintahan lokal. Karena penguatan dan pelembagaan pembangunan partisipatif hanya dapat dilakukan apabila pemerintah lokal (daerah) memiliki kebijakan dan memberikan dukungan (anggaran dan regulasi) yang berpihak kepada rakyat.

Pada tataran operasional, pengintegrasian mensyaratkan adanya perencanaan pembangunan di tingkat Nagari (RPJM Nagari), yang didukung dengan peningkatan manajemen pemerintahan Nagari sebagai basis. Pada konteks itu, efektivitas fasilitasi untuk memastikan pemerintah Nagari membentuk Peraturan Nagari.

(Pernag), menetapkan DAUN dan Pertanggungjawaban Wali Nagari secara rutin menjadi penting. Hal itu juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas proses dan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Nagari, kecamatan dan kabupaten serta keselarasan rencana kegiatan dan anggaran dari



berbagai sumber, khususnya APBD. Proses dimaksud, memunculkan berbagai isu penting: keselarasan penjangkaran aspirasi masyarakat oleh DPRD dengan hasil-hasil Musrenbang (nagari dan kecamatan), akomodasi usulan masyarakat dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD, serta dukungan Peraturan Daerah (Perda) terkait isu-isu di atas.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan RPJM Nagari Tluk Kualo Inderapura Kecamatan Airpura Tahun 2018-2024 didasarkan pada peraturan perundangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5864);

RPJM NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA 2018-2024



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peratusandi Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9024)
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021)
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang SOTK Nagari
18. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017)
19. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 591 tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari tahun 2018 – 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2019

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan RPJM Nagari Tluk Kualo Inderapura Kecamatan Airpura tahun 2018-2024 sebagai berikut :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
 - b. Untuk menciptakan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari, baik antar wilayah, antar fungsi maupun antar tingkat penyelenggaraan pemerintahan
- RPJM NAGARI TLUK. KUALO. INDERAPURA. 2018-2024**
Kabupaten Pesisir Selatan : Terciptanya efisiensi pengalokasian anggaran belanja dan



terciptanya efektifitas anggaran pendapatan Nagari.

1.3 MANFAAT

Adapun Manfaat dari Penyusunan RPJM ini sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKP Nagari, sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan kegiatan serta Monitoring dan Evaluasi
- b. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan dan keadaan setempat dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat
- c. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap program pembangunan
- d. Memilih dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (Keberlanjutan)
- e. Mendorong dan menumbuhkan kembangkan partisipasi dan keswadayaan dalam pembangunan
- f. Sebagai ruang interaksi antara masyarakat dengan pemerintah

BAB II PROFIL NAGARI

2.1 Sejarah Nagari Tluk Kualo Inderapura

Nagari Tluk Kualo Inderapura merupakan Nagari yang unik dan bersejarah sesuai dengan namanya, disebut dalam bahasa asli Inderapura “TLUK” (Teluk) artinya daratan yang menjorong ke sungai dan “Kualo” awalnya berasal dari kata “ Kuali” karena Tluk tersebut artinya cukup dalam dan selalu menguap dan mengelembung seperti “Kuali” besar hingga cerita punya cerita oleh leluhur dahulu diperhalus bahasanya “Tluk Kualo” artinya adalah teluk yang sangat dalam dan airnya mengelembung seperti kuali. Jadi Tluk Kualo Inderapura adalah teluk yang sangat dalam .

Teluk ini terletak di sebelah barat Kantor Pemerintahan Nagari Tluk Kualo Inderapura tepatnya tidak beberapa meter jaraknya dan Muara Palokan yang merupakan jalur pintu masuk transportasi Nagari menuju kesebuah tempat bersejarah salah satu Istana Kesultanan Inderapura yaitu TUANKU BERDARAH PUTIH yang bergelar

RPJM NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA 2018-2024



SULTAN ISKANDAR BAGAGAR ALAMSYAH. Salah satu raja kesultanan Inderapura yang pernah Jaya pada zamannya.

Untuk mengingat peristiwa yang bersejarah tersebut, Karena Inderapura merupakan salah satu kesatuan masyarakat dalam system kesultanan kerajaan Inderapura yang pernah jaya pada zamannya. Kini dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat terjadi pemekaran Nagari dari Inderapura satu Nagari menjadi 20 Pemerintahan Nagari. Salah satu dari Nagari tersebut adalah Nagari Tluk Kualo Inderapura.

Nagari Tluk Kualo Inderapura ditetapkan menjadi Nagari yang defenitif pada tanggal 30 Juni 2011 melalui Perda Kabupaten Pesisir Selatan No 93 tahun 2011 tentang pembentukan Pemerintahan Nagari Tluk Kualo Inderapura.

Nagari Tluk Kualo Inderapura merupakan pemekaran dari kecamatan Pancung Soal yaitu belahan dari Dua Nagari yaitu Nagari Inderapura Barat (Kampung Palokan Hilir) dan Nagari Muara Sakai Inderapura (Kmapung Lubuk Gedang Lamo). Setelah pemekaran Nagari Tluk Kualo Inderapura kampong Palokan Hilir bernama Kampung “Medan Baik” dan Kampung Lubuk Gedang Lamo bernama Kampung “Rimbo Lumang”. Untuk mengingat sejarah agar tidak hilang ditelan waktu, maka nama Palokan Hilir dijadikan nama salah satu jalan yang berada di kampong Medan Baik, tepatnya jalan yang melewati Kantor Wali Nagari dan nama Lubuk Gedang Lamo dijadikan salah satu nama jalan di Kampung Ribo Lumang yaitu tepatnya disamping Mesjid Quba menuju Muara Palokan itulah jalan Lubuk Gedang Lamo.

Setelah terbentuknya Nagari Tluk Kualo Inderapura pada tanggal 30 juni 2011, maka dilanjutkan pemilihan Wali Nagari defenitif pada desember 2011 dan terpilih Wali Nagari defenitif pertama yaitu Bapak DEDI JOAFNALDI, S.Sos.I. Periode 2012-2018 dan pada tanggal 03 mei tahun 2018 langsung pemilihan Wali Nagari Tluk Kualo Inderapura periode 2018-2024 yang akhirnya terpilih kembali Bapak DEDI JOAFNALDI, S.Sos.I untuk periode kedua yang akan menjabat hingga tahun 2024.

ESTAFET KEPEMIMPINAN NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA

RPJM NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA 2018-2024



Wali Nagari I

DEDI JOAFNALDI, S.Sos.I

Wali Nagari II

DEDI JOAFNALDI, S.Sos.I

Wali Nagari yang menjabat saat ini

DEDI JOAFNALDI, S.Sos.I

Kegiatan Pemerintahan Nagari Tluk Kualo Inderapura awalnya dilakukan di rumah kediaman salah satu perangkat Nagari, karena awal Pemerintahan Nagari baru pemekaran belum mempunyai sarana dan prasarana kantor Pemerintahan Nagari. Dengan operasional yang terbatas dan Nagari ini belum memiliki kas dan hanya memiliki tanah kas Nagari seluas $\pm 1,5$ Ha, maka dengan perkembangan seiring jalannya Pemerintahan Nagari periode 2012-2018, kini Pemerintahan Nagari Tluk Kualo Inderapura telah memiliki kantor Pemerintahan Nagari sendiri yang dibangun di atas tanah kas Nagari dan di tambah dengan fasilitas umum lainnya, seperti sarana pendidikan TK-PAUD, gedung Sanggar Seni Nagari, Poskesri, Lumbung pangan Nagari, rumah pengeringan bawang merah dan bangunan fasilitas umum lainnya serta didorong dengan mitra kerja sama Nagari oleh pihak ketiga baik dengan PT.INCASI RAYA dan KSU TAQWA.

Di periode kedua Pemerintahan Nagari Tluk Kualo Inderapura dibawah kepemimpinan Bapak DEDI JOAFNALDI, S.Sos.I dengan Visi mewujudkan masyarakat Nagari Tluk Kualo Inderapura yang mandiri, berbudaya, agamais dan sejahtera berlandaskan “Adat basandi Syara’, Syarak Basandi Kitabullah”, dengan menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat, baik agama, social budaya, pendidikan, kesehatan dan sektor ekonomi masyarakat. Disisi lain arah kebijakan kedepan adalah penataan potensi Nagari dalam rangka mengembangkan pendapatan asli desa/Nagari. Perencanaan yang berbasis kawasan serta penataan lingkungan

RPJM NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA 2018-2024



sesuai dengan rencana tata ruang Nagari Tluk Kualo Inderapura dengan slogan “Tekadku Membangun Tluk Kualo Inderapura”.

1. Keadaan Sosial

Narasi keadaan sosial Nagari Tluk Kualo Inderapura

Kembalinya system pemerintahan kepada otonomi daerah umumnya sumatera barat kembali kenagari khusus Nagari Tluk Kualo Inderapura merupakan bagian dari kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki solidaritas dengan nilai adat dan budaya, masyarakat tluk kualo inderapura memiliki jiwa gotong royong dan semangat social yang tumbuh secara positif dalam kehidupan bermasyarakat. Nagari Tluk Kualo Inderapura merupakan bagian masyarakat yang mewariskan system adat, tradisi dan nilai budaya berdasarkan nilai-nilai luhur warisan kerajaan inderapura . Di Nagari Tluk Kualo Inderapura terdapat 2 (dua) sanggar seni budaya nagari yaitu:

1. Sanggar kesenian dan kebudayaan “Sutan Lembak Tuah”
2. Sanggar Seni dan Budaya “Puti Gubalo Intan”

2. Keadaan ekonomi

Narasi tentang keadaan ekonomi Nagari Tluk Kualo Inderapura

Masyarakat Nagari Tluk Kualo Inderapura pada umumnya merupakan masyarakat agraris yang bermata pencarian sebagai petani. Disisi lain masyarakat Tluk Kualo Inderapura bermata pencarian sebagai kariawan perusahaan, jasa perdagangan, perikanan, perkebunan, kehutanan, penyelam lokan, PNS, ABRI, dan pensiunan, penambang galian c, industry rumah tangga, peternak.

Pemerintah Nagari Tluk Kualo Inderapura sekarang sedang memprioritaskan ekonomi pada sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan. Tanaman perkebunan yang berkembang pesat di Tluk Kualo Inderapura adalah kelapa sawit, Pinang, Kelapa hibrida, coklat yang memilki pasaran. Sementara dipasar nasional terdapat holtikultural seperti padi, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang-kacangan, semangka, mentimun, cabe, sayur-sayuran dan lain sebagainya.

Pada sektor pertambangan masyarakat Tluk Kualo Inderapura juga memanfaatkan aliran sungai sebagai tempat menambang koral dan pasir sebagai mata pencarian masyarakat.

RPJM NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA 2018-2024



3. Pembagian Wilayah Nagari

Nagari Tluk Kualo Inderapura kecamatan Airpura kabupaten pesisir selatan merupakan satu dari 10 Nagari yang ada di kecamatan Airpura mempunyai jarak 120 KM dari pusat kabupaten dengan 10 Km jarak dari pusat kecamatan.

Secara Geografis Nagari Tluk Kualo Inderapura berbatas dengan

- sebelah barat berbatas dengan Nagari Pulau Rajo Inderapura
- sebelah timur berbatas dengan Nagari Inderapura Timur dan Tanah Bakali
- sebelah utara berbatas dengan Nagari Muara Inderapura dan Palokan Inderapura
- sebelah selatan berbatas dengan Nagari Muara Sakai Inderapura, Inderapura dan Inderapura Tengah

2.2 Peta dan Kondisi Nagari

A. Peta Sosial Pemerintah Nagari Tluk Kualo Inderapura





B. Kondisi Nagari

Secara geografis Nagari Tluk Kualo Inderapura terletak pada posisi $7^{\circ}21' - 7^{\circ}31'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}10' - 111^{\circ}40'$ Bujur Timur. Topografi Jarak Nagari Tluk Kualo Inderapura 2 KM dari air laut. Secara administratif, Nagari Tluk Kualo Inderapura terletak di wilayah Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dengan posisi dibatasi oleh wilayah Sungai dan desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan Nagari Muara Inderapura. Di sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Pulau Rajo. Di sisi Selatan berbatasan dengan Nagari Inderapura Barat dan Muara Sakai Kecamatan Pancung Soal. sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Palokan Inderapura. Jarak tempuh Nagari Tluk Kualo Inderapura ke ibu kota kecamatan adalah 8 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 20 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 80 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 3 jam.

Nagari Tluk Kualo Inderapura memiliki lahan yang terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukkan untuk Perkebunan sawit swasta 300 Ha, Perkebunan rakyat atau masyarakat lebih kurang 1800 Ha, Sawah teknis 167 Ha dan sudah menjadi sawah 182 Ha, Sawah setengah teknis seluas 130 Ha, Perikanan darat 3 Ha, Tempat Rekreasi 2 Ha dan Tempat yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana olah raga 3.5 Ha

RPJM NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA 2018-2024



Wilayah Nagari Tluk Kualo Inderapura secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah kuning yang disebut tanah tanjung yang sangat cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan.. Hal ini memungkinkan tanaman padi untuk dapat panen dengan menghasilkan 8,5 ton/ ha. Tanaman jenis palawija juga cocok ditanam di sini seperti Cabai, kacang tanah, kacang panjang, jagung, dan ubi kayu, ubi jalar, serta tanaman buah seperti mangga, pepaya, melon dan pisang juga mampu menjadi sumber pemasukan (income) yang cukup handal bagi penduduk desa ini. Untuk tanaman perkebunan, jagung merupakan tanaman andalan.

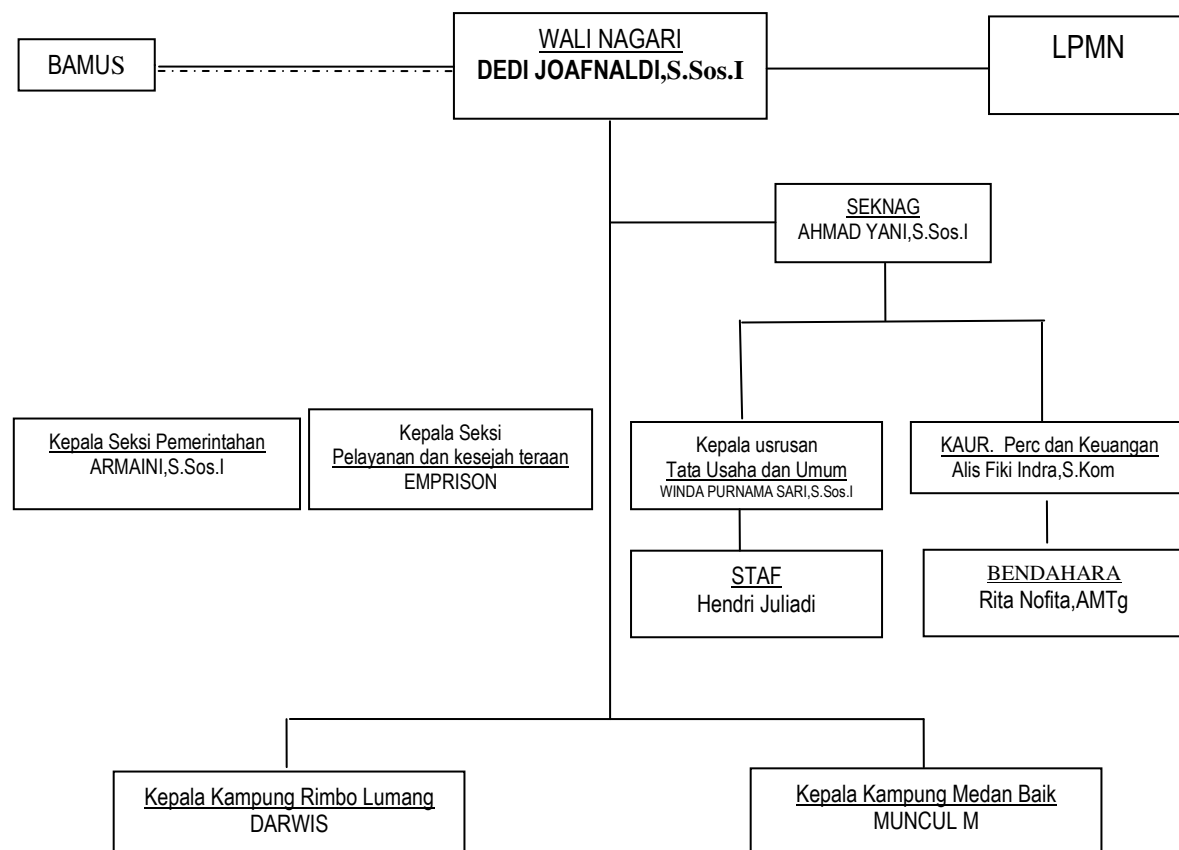
Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Nagari Tluk Kualo Inderapura dapat teridentifikasi ke dalam beberap sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Angka pengangguran di Nagari Tluk Kualo Inderapura juga masih cukup tinggi. Usaha kecil seperti toko pracangan, pedagang P dan D, pedagang pasar, dll masih banyak yang kurang berkembang akibat keterbatasan dana / modal. Tambahan modal sangat diperlukan bagi perkembangan usaha kecil mereka agar bisa mengelola kegiatan usahanya secara lebih maksimal dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara layak. Demikian pula bagi usaha produktif seperti pemilik kolam ikan, peternak, dan usaha produktif lainnya juga terkendala dalam hal modal, sekaligus juga kemampuan pengelolaan usaha yang terbatas sehingga membutuhkan pembinaan dan pelatihan managerial yang intensif dari dinas-dinas terkait.



2.3. Kelembagaan Nagari

1. Pemerintah Nagari

a. Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Tluk Kualo Inderapura





b. Tabel Nama Pemerintah Nagari

Tabel 1

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT TANGGAL LAHIR	TAMATAN
1	2	3	4	5
1	DEDI JOAFNALDI,S.Sos.I	WALI NAGARI	INDERAPURA, 12-11-1983	S1
2	AHMAD YANI	SEKRETARIS NAGARI	INDERAPURA 28-08-1985	S1
3	ARMAINI	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	INDERAPURA 14-05-1975	SMA
4	EMPRISON	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN	BALAI SELASA 04-08-1975	SMA
5	ALIS FIKI INDRA,S.Kom	KEPALA URUSAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	INDERAPURA 03-10-1990	S1
6	WINDA PURNAMA SARI,S.Sos.I	KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM	PASAR GEDANG 21-01-1989	S1
7	RITA NOFITA,AMTg	BENDAHARA	INDERAPURA 28-07-1989	D3
8	HENDRI JULIADI	STAFF	INDERAPURA 12-07-1983	SMA
8	MUNCUL M	KEPALA KAPUNG	INDERAPURA 05-06-1958	SMA
9	DARWIS	KEPALA KAPUNG	04-04-1986	SMA

c. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja (Sotk) Pemerintah Nagari

1. Nagari adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang

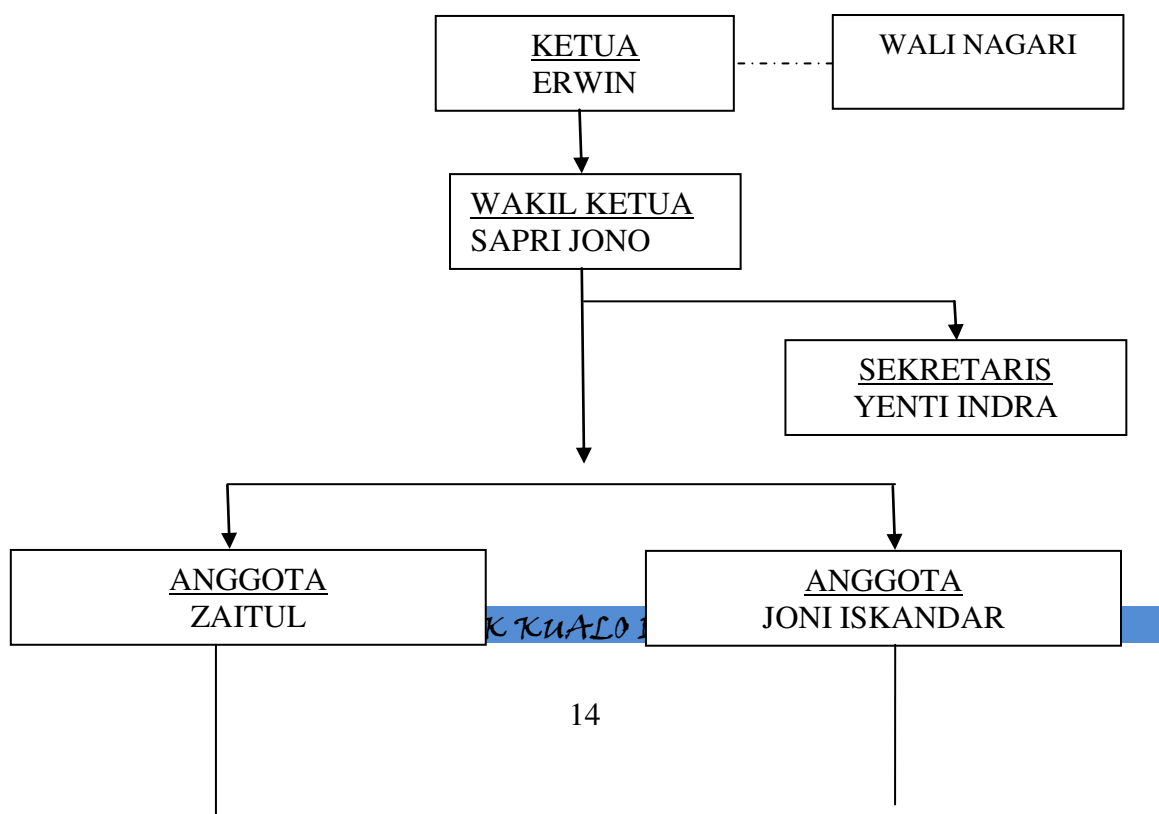


untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

2. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
3. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
5. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Nagari adalah Sekretaris Nagari, Pelaksana Teknis Lapangan dan Pelaksana Kewilayahan.
7. Aset Nagari adalah barang milik Nagari yang berasal dari kekayaan asli Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Nagari atau perolehan hak lainnya yang sah.

2. BAMUS

a. Struktur Bamus





b. Tabel Nama Bamus

Tabel 2

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT TANGGAL LAHIR	TAMATAN
1	2	3	4	5
1	ERWIN	KETUA	INDERAPURA 17-09-1965	SMA
2	SAPRI JONO	WAKIL KETUA	INDERAPURA 12-11-1986	SMA
3	YENTI INDRA	SEKRETARIS	INDERAPURA 12-08-1983	SMA
4	JONI ISKANDAR	ANGGOTA	INDERAPURA 27-07-1992	SMA
5	ZAITUL	ANGGOTA	INDERAPURA 16-02-1977	SMA
6	YENI GUSNITA SARI,S.Pd	STAFF	INDERAPURA 14-08-1988	S1

BAB III PROSES PENYUSUNAN RMJM

3.1. Pengkajian Keadaan Nagari

1. Sketsa Pengkajian Nagari Berdasarkan Peta Sosial

Tabel 13

No	Kampung	Masalah	Potensi Penyelesaian
----	---------	---------	----------------------



BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM

I	Medan Baik	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Belum optimalnya system teknologi informasi dalam pelayanan Masyarakat	Tersedia alat computer Tersedia jaringan wifi
	Medan Baik	Perlunya optimalisasi implementasi master plan Nagari	Tersedia alat computer Tersedia jaringan wifi
	Medan Baik	Belum optimalnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Nagari	Banyaknya tamatan S1 perangkat nangari
	Medan Baik	Belum lengkapnya Data Base kependudukan, luas lahan serta pemetaan wilayah yang detail dan lengkap	Tersedia alat computer Tersedia jaringan wifi
	Medan Baik	Lemahnya kerja sama antar Nagari	Tingginya hubungan kekeluargaan antar nagari
II		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	
		BIDANG PENDIDIKAN	
	Rimbo Lumang	Masih terbatasnya Sarana dan Prasarana SD 09 Airpura dan SMPN 04 AIRPURA	Tingginya Minat Belajar Siswa Tersedianya tempat pendidikan Tersedianya tenaga pengajar Tingginya Minat Belajar Siswa Tersedianya tempat pendidikan Tersedianya tenaga pengajar
	Rimbo Lumang	Masih terbatasnya Sarana dan Prasarana SMPN 04 AIRPURA	Tingginya Minat Belajar Siswa Tersedianya tempat pendidikan Tersedianya tenaga pengajar Tingginya Minat Belajar Siswa Tersedianya tempat pendidikan
RPJM NAGARI TUKU KUALO INDERAPURA 2018-2024			



			Tersedianya tenaga pengajar
	Medan Baik	Terbatasnya Fasilitas TK PAUD Harapan Bangsa	Tingginya Minat Belajar Siswa Tersedianya tempat pendidikan Tersedianya tenaga pengajar Tingginya Minat Belajar Siswa Tersedianya tempat pendidikan Tersedianya tenaga pengajar
	Medan Baik	Perlunya Peningkatan Kapasitas / skill untuk menghadapi dunia kerja	Banyak Kalangan Muda tamatan SMA dan S1
	Medan Baik	Belum tersedianya gedung MDA	Tingginya Minat Belajar Siswa Tersedianya tempat pendidikan Tersedianya tenaga pengajar Tingginya Minat Belajar Anak2 baca alqur'an
	Medan Baik Rimbo Lumang	Terbatasnya akses beasiswa untuk study lanjut untuk perguruan tinggi/pelatihan kerja/Magang	Banyaknya siswa yang berprestasi Banyaknya Siswa tamatan SMA
	Medan Baik Rimbo Lumang	Terbatasnya pembiayaan pendidikan bagi warga miskin	Banyaknya siswa yang berprestasi Banyaknya Siswa tamatan SMA
	Medan Baik Rimbo Lumang	Lemah minat baca masyarakat	Tingginya Minat Belajar Siswa Tersedianya tempat pendidikan Tersedianya tenaga pengajar
		BIDANG INFRASTRUKTUR	
	Medan Baik Rimbo Lumang	Masih banyaknya ruas jalan nagari dan jalan kabupaten yang rusak dan perlu pengaspalan	Adnya dana Nagari ADD dan DD Adanya dana APBD Kab Adanya jalan
RPJM NAGARI TUK KUALO INDERAPURA 2018-2024			



III	Medan Baik	Perlunya Rehabilitasi fasilitas umum, seperti, kesehatan, pendidikan, tempat ibadah, gedung sanggar, poskamling dan fasilitas umum lainnya	Adanya dana Nagari Adanya dana APBD Kab Adanya jema'ah Adanya organisasi Pemuda Adanya Organisasi Kemasyarakatan Adanya Sanggar Nagari
	Medan Baik	Perlunya perbaikan jalan lingkaran nagari dengan penanda wilayah (GAPURA) dan fasilitas penerangan jalan yang masih sangat terbatas	Adanya dana Nagari Adanya dana APBD Kab
	Medan Baik	Belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana cagar sejarah tuanku berdarah putih	Adanya dana Nagari Adanya dana APBD Kab Adanya cagar budaya sejarah
	Medan Baik Rimbo Lumang	Perlunya peningkatan infrastruktur kantor Nagari dan Bamus Nagari	Adanya kantor wali nagari Adanya tapal batas Nagari
	Medan Baik Rimbo Lumang	Belum tertatanya saluran Drainase disepanjang jalan pemukiman penduduk	Adanya dana Nagari Adanya dana APBD Kab
	Medan Baik Rimbo Lumang	Masih adanya saluran air yang belum tertata dikawasan area pertanian	Luasnya Lokasi Sawah Adanya Aliran Air Sekunder Adanya Bak Pembagi Air
	Medan Baik	Masih adanya jaringan listrik yang belum terjangkau ke wilayah pemukiman penduduk	Adanya Jaringan Listrik Adanya dana Nagari
	Medan Baik Rimbo Lumang	Belum adanya akses ruang publik yang terintegrasi dengan ruang bermain anak	tersedianya tempat Sarana Banyaknya Anak-anak Adanya Dana Nagari
		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
		SUB BIDANG KESEHATAN	
RPJM NAGARI TUKU KHALO INDERAPURA 2018-2024			



BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM

IV	Medan Baik Rimbo Lumang	Masih rendahnya kesadaran akan pentingnya jaminan kesehatan	Adanya Bidan desa Adanya Kader KB
	Medan Baik Rimbo Lumang	Perlunya jaminan kesehatan/perlindungan kesehatan bagi warga Miskin	Adanya Bidan desa Adanya Kader KB
	Medan Baik Rimbo Lumang	Terbatasnya akses pemeriksaan kesehatan ibu hamil, Anak dan Lansia	Adanya Bidan desa Adanya Kader KB Adanya dana desa
	Medan Baik Rimbo Lumang	Terbatasnya fasilitas dan sarana kesehatan tingkat Nagari	Adanya Bidan desa Adanya Kader KB Adanya dana desa
	Medan Baik Rimbo Lumang	Rendah kesadaran akan kesehatan lingkungan	Adanya Bidan desa Adanya Kader KB Adanya dana desa
		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI	
		SUB BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	
	Medan Baik Rimbo Lumang	Masih banyaknya akses jalan pertanian yang perlu perbaikan untuk memperlanca transportasi hasil pertanian	Adanya Badan Jalan Adanya Kelompok Tani Adanya PPL
	Medan Baik	Perlunya perbaikan /peningkatan saluran kualitas saluran irigasi dan fasilitas pendukung lainnya	Adanya Badan Jalan Adanya Gapoktan Adanya PPL
	Medan Baik Rimbo Lumang	Keterbatasan peralatan saprodi petani	Adanya Gapoktan Adanya PPL
RPJM NAGARI TUK KUALO INDERAPURA 2018-2024			



BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM

	Medan Baik Rimbo Lumang	Keterbatasan pupuk bersubsidi dan mahal nya harga pupuk, masih menjadi kendala bagi petani	Adanya Gapoktan Adanya PPL Adanya Puuk Organik
	Medan Baik Rimbo Lumang	Masih adanya petani dengan hasil panen yang tidak optimal akibat gangguan hama sehingga diperlukan bimtek bagi petani	Adanya Gapoktan Adanya PPL Adanya Puuk Organik
	Medan Baik Rimbo Lumang	Masih banyaknya kebun sawit rakyat yang tidak memiliki bibit unggul, sehingga berpengaruh terhadap produksi	Adanya Lahan Sawit Adanya Gapoktan Adanya PPL Adanya Puuk Organik
	Medan Baik Rimbo Lumang	Perlunya peremajaan Sawit/Raplanting	Adanya Lahan Sawit Adanya Gapoktan Adanya PPL Adanya Puuk Organik
	Medan Baik Rimbo Lumang	Rendahnya harga TBS Sawit Masyarakat	Adanya Lahan Sawit Adanya Gapoktan Adanya PPL Adanya Pupuk Organik
	Medan Baik	Rendahnya kesadaran Petani akan pola tanam system organic	Adanya Gapoktan Adanya PPL Adanya Puuk Organik
	Medan Baik	Optimalisasi peran GAPOKTAN dalam pendampingan Petani	Adanya Gapoktan Adanya PPL Adanya Puuk Organik
	Medan Baik Rimbo Lumang	Belum tertatanya system pola tanam sesuai kalender musim yang teratur	Adanya Gapoktan Adanya PPL Adanya Puuk Organik
	Medan Baik Rimbo Lumang	BIDANG EKONOMI Naiknya harga kebutuhan pokok, masih menjadi kendala bagi masyarakat dan menjadi beban ekonomi terbesar bagi	Adanya Pedagang Adanya Kelompok Keterampilan Kerajinan
RPJM NAGARITUKU KUALA INDERAPURA 2018-2024			



		rumah tangga	
	Medan Baik	Sector usaha kecil berjalan lambat akibat kurangnya pemasaran dan peluang pasar	Adanya Pedagang Adanya Kelompok Keterampilan Kerajinan Tangan
	Medan Baik	Belum tersedianya pasar Nagari, yang berakibat rendahnya akses pasar dan daya jual hasil pertanian masyarakat	Banyaknya Hasil sembako Adanya pedagang
	Medan Baik	Perlunya peran BUMNAG sebagai penggerak ekonomi Nagari	Adanya BUMNAG
	Medan Baik Rimbo Lumang	Pelaku usaha perikanan belum dapat menoptimalkan potensi perikanan sebagai produk olahan sehingga daya jual rendah	Adanya Tanbak Ikan Adanya Kelompok Penyelam Lokan Adanya Pedagang Lokan
	Medan Baik Rimbo Lumang	Ibu-ibu rumah tangga belum memiliki penghasilan tambahan Banyaknya pemuda yang masih penganggur	Adanya Kelompok Keterampilan Kerajinan Tangan Adanya Pemuda Tamatan SMA dan S1
	Medan Baik Rimbo Lumang	Perlunya pembekalan untuk wirausaha Muda	Adanya Organisasi Pemuda
	Medan Baik Rimbo Lumang	Belum terdianya fasilitas/ sarana tambatan perahu /sampan bagi masyarakat penyelam lokan (dermaga pelelangan lokan)	Adanya Kelompok Penyelam Lokan Adanya Sungai Penghasil Lokan dan Ikan
	Medan Baik Rimbo Lumang	Rendahnya pendapatan asli Nagari sehingga diperlukan penambahan modal BUMNAG untuk pembelian kebun Nagari	Adanya BUMNAG
	Medan Baik Rimbo Lumang	Belum terkelolanya kotoran ternak secara optimal sehingga	Banyaknya Sapi Penduduk Luasnya Tempat Sektor Tani
		diperlukan gudang pengolahan pupuk	

RPJM NAGARI TILUK KHALO INDERAPURA 2018-2024



		organik Untuk meningkatkan nilai tambah peternakan masyarakat dan PAN	
--	--	---	--

2. Pengkajian Nagari berdasarkan Kalender Musim

Tabel 14

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	MASALAH KEGIATAN KEADAAN
			*	*	*	*	*	*					Karena Pemanasan Global Cuaca Jadi Tidak menentu setiap bulannya, Bila musim panas kekeringan
	*	*							*	*	*	*	

3. Analisa Masalah dan Potensi Musim

Tabel 15

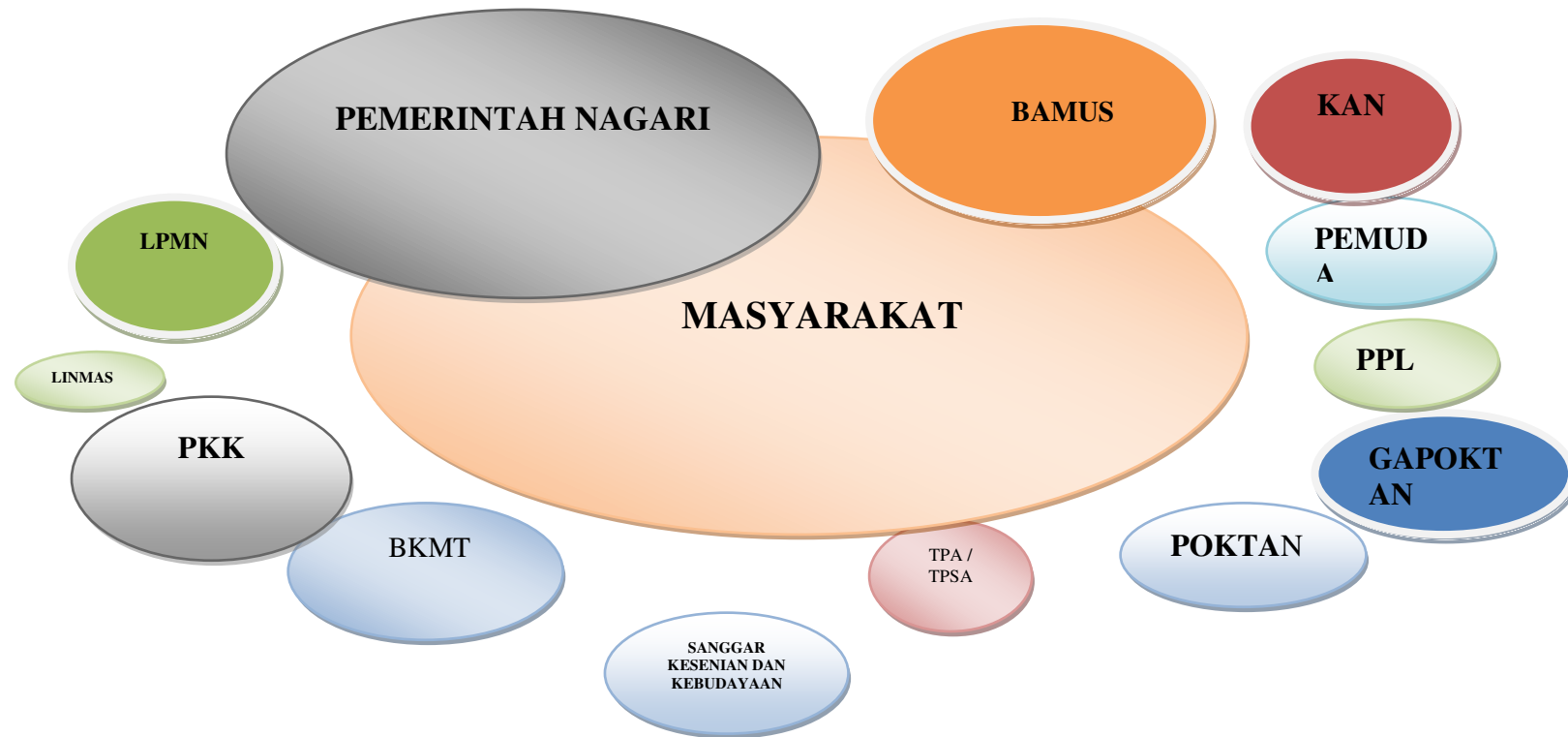
No	Kampung	Musim	Masalah	Potensi
----	---------	-------	---------	---------



1	Medan Baik	Hujan	Terdapat beberapa Jalan yang Becek dan tidak layak Masyarakat kesulitan menuju areal pertanian Mewabahnya bibit penyakit Banjir yang mengakibatkan gagal panen	Adanya Galian c Swadaya Masyarakat Adanya Galian c Swadaya Masyarakat Adanya Kader Kesehatan Adanya Bidan Kampung Adanya Pustu Adanya Galian C Swadaya masyarakat
		Kemarau	Kekurangan Air bersih Jalan Berkabut	PDAM Adanya Galian c Adanya Mobil Penyiram
2	Rimbo Lumang	Hujan	Terdapat beberapa Jalan yang Becek dan tidak layak Masyarakat kesulitan menuju areal pertanian Mewabahnya bibit penyakit	Adanya Galian c Swadaya Masyarakat Adanya Galian c Swadaya Masyarakat Adanya Kader Kesehatan Adanya Bidan Kampung Adanya Pustu
		Kemarau	Banjir yang mengakibatkan gagal panen Kekurangan Air bersih Jalan berkabut	Adanya Galian C Swadaya masyarakat PDAM



4. Keadaan Kelembagaan Menggunakan Diagram Venn



RPTM NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA 2018-2024



Adapun Penjelasan tentang Pengakajian Nagari sebagai Berikut:

1. Pengertian

Pengkajian keadaan nagari adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait, yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat nagari.

2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara objektif, lengkap dan cermat tentang:

- a. Potensi nagari
- b. Permasalahan yang dihadapi
- c. Kebutuhan masyarakat

3. Fasilitator

Kegiatan pengkajian keadaan nagari difasilitasi oleh KPMN dan LPMN

4. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan nagari dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat dan Nagari).

5. Alat Kaji dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Nagari, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan. Instrumen yang digunakan adalah Form-form B (Masukan) dan C (Proses) sesuai lampiran Permendagri No. 66 Tahun 2007.

6. Proses

- a. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau kampung untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- b. Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan pengelompokan dan penentuan peringkat masalah
- c. Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah

- d. Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan Penentuan Peringkat



Tindakan

7. Waktu Pelaksanaan

Durasi (lamanya) waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengkajian keadaan nagari disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nagari yang bersangkutan.

8. Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah:

1. Data Potensi Nagari
2. Data Permasalahan
3. Data Kebutuhan/Peringkat Tindakan Sesuai matrik lampiran Permendagri No. 66 Tahun 2007.

1. Penyusunan Rancangan RPJM-Nagari

1. Rancangan RPJM-Nagari
2. Rancangan RPJM-Nagari dimaksud terdiri dari:
 - a. Naskah rancangan kebijakan pembangunan Nagari dan
 - b. Rencana kegiatan pembangunan Nagari.
 - c. Sistematika Tata Susun Naskah rancangan kebijakan pembangunan Nagari disusun sesuai sistematika/tata susun sebagaimana Lampiran 1.

2. Perumusan Rencana Kegiatan pembangunan Nagari

1. Rencana kegiatan dimaksud disusun sesuai tabel rencana sebagaimana pada Lampiran 2.
2. Rencana kegiatan dimaksud disusun berdasarkan `urusan"
3. Urusan dimaksud dipilah menjadi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan
4. Urusan Wajib adalah semua aspek dan kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan berhubungan secara langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat/indeks pembangunan manusia. mencakup bidang dan kegiatan: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Sarana prasarana. (4) Lingkungan hidup. (5) Sosial budaya, (6) Pemerintahan, dan (6) Koperasi dan usaha masyarakat.
5. Urusan pilihan adalah aspek dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan potensi setempat. mencakup: (1) Pertanian, (2) Kehutanan, (3) Pertambangan,

RPJM NAGARI TILUK KUALO INDERAPURA 2018-2024



(4) Pariwisata. dan (5) Kelautan.

6. Rencana kegiatan dirumuskan dengan menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti.
7. Rumusan rencana kegiatan bersifat khusus, terukur. dapat diterima, realistis dan jelas kerangka waktunya.

3. Rapat Penyusunan

1. Penyusunan Rancangan RPJM-Nagari dilakukan dalam forum Rapat Tim Penyusun
2. Rapat dimaksud dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang terdiri dari seorang Ketua atau sebutan lain. seorang Wakil Ketua atau sebutan lain dan seorang Sekretaris.
3. Wali Nagari dan Sekretaris Nagari karena jabatannya adalah ketua dan Sekretaris Rapat Tim Penyusun.
4. Wakil Ketua Rapat dipilih dari dan oleh anggota Tim Penyusun secara demokratis.
5. Setiap rapat dimaksud membahas agenda yang telah ditetapkan secara jelas.
6. Agenda dan tatacara rapat dibahas dan disepakati pada Rapat Pertama Tim Penyusun.
7. Rapat Tim Penyusun dilakukan beberapa kali sampai tersusun Rancangan RPJM-Nagari yang lengkap dan layak.
8. Rapat dimaksud dipilah menjadi: (1) Rapat Pleno, dan (2) Rapat Komisi
 - a. Rapat Pleno
 - 1) Rapat Pleno dimaksud membahas dan merumuskan Naskah Kebijakan Pembangunan Nagari dan membahas hasil Rapat Komisi.
 - 2) Rapat Pleno diikuti oleh semua anggota Tim Penyusun Rapat Komisi
 - b. Rapat Komisi
 - 1) Rapat Komisi dimaksud membahas dan menyusun rencana kegiatan pembangunan Nagari
 - 2) Pembentukan Komisi dimaksud memperhatikan "Urusan" dan disesuaikan dengan jumlah anggota Tim dan kebutuhan.

RPJM NAGARI TUKU KUALA INDERAPURA 2018-2024

3) Rapat Komisi dimaksud dipimpin oleh Pimpinan Rapat Komisi



4) Pimpinan Rapat dimaksud terdiri dari seorang Ketua atau sebutan lain dan seorang Sekretaris

5) Pimpinan Rapat dimaksud dipilih dari dan oleh anggota Komisi secara demokratis.

c. Waktu Penyusunan

Penyusunan Rancangan dimaksud dilakukan setelah Pengkajian Keadaan Nagari sampai dengan sebelum pelaksanaan Musrenbang Pembahasan Rancangan RPJM-Nagari.

d. Hasil

Kegiatan penyusunan menghasilkan Dokumen Rancangan (Awal) RPJM-Nagari

4. Pembahasan Rancangan RPJM-Nagari

1. Forum Pembahasan

- a. Rancangan (Awal) RPJM-Nagari dibahas bersama masyarakat dalam ***Forum Musrenbang Nagari***.
- b. Musrenbang dimaksud adalah Forum Musrenbang Nagari yang diselenggarakan khusus, 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun. untuk membahas rancangan (Awal) RPJM-Nagari.

2. Peserta

Pihak-pihak yang wajib diundang sebagai peserta Musrenbang Nagari dimaksud adalah

- a. Tim Penyusun
- b. Wakil kelompok-kelompok masyarakat. Ormas. dan LSM
- c. Wakil kelompok perempuan
- d. Wakil masyarakat miskin
- e. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Nagari
- f. Dapat mengundang unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu
- g. Fasilitator
- h. Proses pembahasan Rancangan RPJM-Nagari difasilitasi oleh tim fasilitator yang terdiri dari KPMN dan LPMN.

3. Proses Pembahasan



Agenda dan proses pembahasan adalah sebagai berikut:

- a. Pembukaan dan pengarahan oleh Camat
- b. Pemaparan proses penyusunan Rancangan RPJM-Nagari oleh Wali Nagari
- c. Pemaparan pokok-pokok materi Rancangan (Awal) RPJM-Nagari oleh Tim Penyusun
- d. Tanggapan, masukan dan saran dari peserta Musrenbang Nagari
- e. Tanggapan balik Wali Nagari Tim Penyusun
- f. Pembahasan oleh peserta
- g. Pembahasan dimaksud dilakukan dalam kelompok-kelompok diskusi.
- h. Jumlah kelompok dimaksud disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan
- i. Kelompok diskusi dimaksud dipimpin oleh pimpinan diskusi, yang terdiri dari seorang Ketua atau sebutan lain dan seorang sekretaris.
- j. Pimpinan diskusi dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi secara demokratis.
- k. Penyampaian hasil-hasil pembahasan peserta Musrenbang
- l. Penjelasan tindak lanjut hasil pembahasan Rancangan RPJM-Nagari oleh Wali Nagari

4. **Penutupan oleh Wali Nagari**

5. **Hasil**

Hasil proses pembahasan dimaksud adalah Rancangan (Akhir) RPJM-Nagari.

5. **Penetapan Rancangan RPJM-Nagari**

1. **Forum Penetapan**

- a. Rancangan (Akhir) RPJM-Nagari ditetapkan dalam Forum Rapat BAMUS.
Yang diselenggarakan oleh dan sesuai Peraturan Tata Tertib BAMUS
- b. Rapat dimaksud dipimpin oleh Pimpinan BAMUS.

2. **Peserta Rapat**

Peserta Rapat BAMUS untuk penetapan Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM-Nagari adalah :

- a. Semua Anggota BAMUS



- b. Wali Nagari
- c. Sekretaris Nagari
- d. Semua Wali Urusan (Kaur) Pemerintah Nagari
- e. Anggota Tim Penyusun Rancangan RPJM-Nagari
- f. Wakil masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan kelompok perempuan dan masyarakat miskin.
- g. Pengurus Ormas dan/atau LSM
- h. Unsur masyarakat lainnya

3. Sifat Rapat

- a. Rapat BAMUS untuk penetapan Pernag tentang RPJM-Nagari bersifat terbuka untuk umum
- b. Penetapan/Pengesahan
- c. Rancangan (Akhir) RPJM-Nagari ditetapkan dan disahkan dengan Peraturan Nagari (Pernag)

6. Pengajuan Rancangan Pernag

Wali Nagari wajib mengajukan Rancangan Pernag tentang RPJM-Nagari kepada BAMUS, paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang Nagari Pembahasan Rancangan (Awal) RPJM-Nagari

1. Penetapan Jadwal Pembahasan dan Penetapan oleh BAMUS

- a. Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Rancangan Pernag dimaksud diterima. BAMUS menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Penetapan Rancangan Pernag tentang RPJM-Nagari
- b. Rapat Penetapan dimaksud dilaksanakan selambat- lambatnya 2 (dua) minggu setelah Rancangan Pernag tentang RPJM-Nagari diterima.

2. Proses Rapat Penetapan

- a. Pembukaan dan Pengantar Rapat oleh pimpinan Rapat
- b. Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM-Nagari oleh Wali Nagari

c. Tanggapan Anggota BAMUS



- d. Jawaban Wali Nagari (Tim Penyusun)
- e. Pengambilan Keputusan/Penetapan Pernag tentang RPJM- Nagari
- f. Penandatanganan naskah Pernag oleh Wali Nagari dan Ketua BAMUS.
- g. Hasil
 - ✓ Peraturan Nagari (Pernag) tentang RPJM-Nagari

7. Sumber Dana

Pembiayaan yang timbul dari kegiatan penyusunan RPJM-Nagari dipenuhi dari sumber dana:

1. APBD Kabupaten/Kota
2. APB Nagari
3. APBN
4. Swadaya Masyarakat
5. Sumber lain yang tidak mengikat

3.2. Musyawarah Nagari RPJM Nagari

1. Tujuan penyusunan RPJM-Nagari adalah:

1. Merumuskan rencana pembangunan nagari yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat
2. Merumuskan arah, tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan Nagari
3. Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran
4. Meningkatkan peran serta masyarakat di Nagari dalam proses pembangunan.

2. Prinsip Penyusunan RPJM-Nagari

1. Lengkap artinya RPJM-Nagari mencakup semua aspek pembangunan masyarakat dan Nagari
2. Cermat artinya data-data dasar diperoleh dan dihimpun secara teliti, objektif dan dapat dipercaya
3. Sistematis artinya RPJM-Nagari disusun berdasarkan alur pemikiran logis dan sesuai tata susun yg rapi
4. Partisipatif artinya melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan

RPJM NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA 2018-2024



5. Keterbukaan artinya memberikan akses seluas-luasnya kepada para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi dan mengontrol proses penyusunan RPJM-Nagari.

3. Kaidah Penyusunan RPJM-Nagari

1. RPJM-Nagari sebagai Proses Pemikiran Strategis
2. RPJM - Nagari sebagai Proses Berkelanjutan
3. RPJM - Nagari sebagai Rangkaian Kegiatan yang Sistematis

4. Tim Penyusun RPJM-Nagari

Jumlah anggota Tim Penyusun sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang, yang terdiri dari:

1. Wali Nagari
2. Sekretaris Nagari
3. Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Pengurus LPMN.
4. Bila belum terbentuk LPMN. maka digantikan oleh wakil dari pengurus Ormas dan/atau LSM yang ada di Nagari yang bersangkutan.
5. Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang KPMN, yang salah satunya adalah perempuan.
6. Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Wali kampung.
7. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang wakil masyarakat yang satu diantaranya adalah perempuan

4. Pembentukan Tim Penyusun

1. Tim Penyusun RPJM Nagari dibentuk dalam forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari.
2. Pembentukan Tim dimaksud dilakukan melalui kegiatan:
 - Sosialisasi

Pemerintah Nagari berkewajiban menyebarluaskan informasi dan menjelaskan tentang:

1) Rencana penyusunan RPJM-Nagari

2) Proses dan tahapan kegiatan penyusunan RPJM-Nagari



- 3) Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari
 - 4) Jumlah unsur dan tatacara pemilihan anggota Tim Penyusun
 - 5) Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RPJM-Nagari.
- Pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim Penyusun
Kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Nagari adalah :
 - 1) Mengumumkan pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim Penyusun RPJM-Nagari
 - 2) Memproses pendaftaran calon anggota Tim Penyusun
 - 3) Mengumumkan daftar calon anggota Tim Penyusun
 - 4) Menampung aspirasi dan masukan warga terhadap calon-calon anggota Tim Penyusun.
 - Pemilihan anggota Tim Penyusun
Proses pemilihan anggota Tim Penyusun dilakukan dalam Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari.

5. Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari

1. Rapat Pembentukan Tim dimaksud diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari
2. Penyelenggaraan Rapat Pembentukan Tim dimaksud mencakup kegiatan:
 - a. Persiapan
Kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Nagari untuk mempersiapkan pelaksanaan rapat Tim Penyusun RPJM-Nagari adalah :
 - 1) Menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari
 - 2) Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan
 - 3) Menyampaikan surat undangan rapat kepada para calon anggota Tim Penyusun.
 - b. Pelaksanaan/Proses rapat
Rapat dipimpin oleh Wali Nagari
Pembahasan susunan acara rapat. Susunan acara dimaksud sekurang-kurangnya mencakup:

RPJM NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA 2018-2024

1) Pembukaan



- 2) Penjelasan materi rapat. Materi rapat dimaksud. mencakup:
 - a) Penjelasan proses penyusunan RPJM-Nagari
 - b) Penjelasan Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RPJM-Nagari
 - c) Penyampaian hasil pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim Penyusun
 - d) Penjelasan ketentuan pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari
 - e) Dapat ditambahkan materi lain sesuai kebutuhan.
- 3) Proses pemilihan anggota Tim Penyusun RPJM-Nagari
 Proses pemilihan anggota Tim Penyusun RPJM-Nagari dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah dimaksud tidak berhasil. maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup sesuai aturan yang disepakati forum.
- 4) Penetapan anggota Tim Penyusun RPJM-Nagari.
 Anggota Tim Penyusun RPJM-Nagari ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.
- c. Proses dan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari dan ditanda tangani oleh semua peserta yang hadir.

6. Kedudukan,Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun :

1. Wali Nagari karena jabatannya adalah Penanggung Jawab dan Koordinator Tim Penyusun,bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan RPJM-Nagari
 - b. Memastikan tersosialisasinya agenda pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari
 - c. Melaksanakan rekrutmen calon anggota Tim Penyusun RPJM-Nagari
 - d. Menyelenggarakan rapat pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari
 - e. Mengundang anggota Tim Penyusun
 - f. Memimpin Rapat Tim Penyusun
 - g. Menerbitkan surat keputusan penetapan anggota Tim Penyusun
 - h. Menugaskan KPMN dan LPMN memfasilitasi pengkajian keadaan Nagari
 - i. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM-Nagari



j. Memastikan tersusunnya Rancangan RPJM-Nagari

2. Sekretaris Nagari

Karena jabatannya adalah Sekretaris Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat
- b. Membantu Wali Nagari mengelola Rapat Tim Penyusun
- c. Memastikan tersedianya Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari
- d. Memastikan tersedianya dokumen Rancangan RPJM-Nagari
- e. Pengurus LPMN, KPMN, Wali kampung dan Wakil Masyarakat tersebut di atas adalah sebagai anggota Tim Penyusun. bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Menghadiri rapat Tim Penyusun
 - 2) Membahas dan merumuskan Rancangan RPJM-Nagari

7. Asistensi

Tim Penyusun dalam melaksanakan kegiatan penyusunan Rancangan RPJM-Nagari dibimbing dan dibantu oleh aparat pemerintah (kecamatan dan/atau kabupaten) yang berkompeten, Setrawan (kecamatan dan/atau kabupaten), dan pihak lain yang berkompeten.

8. Masa Tugas

Masa tugas Tim Penyusun terhitung sejak diterbitkannya surat penetapan Tim Penyusun RPJM-Nagari oleh Wali Nagari sampai dengan ditetapkannya Pernag tentang RPJM-Nagari oleh Wali Nagari kepada Bamus.

9. Tahapan Kegiatan Penyusunan RPJM-Nagari

1. Persiapan



Pada tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan adalah

- a. Memastikan kesiapan KPMN dan LPMN
- b. Memastikan penugasan KPMN dan LPMN melakukan fasilitasi pengkajian keadaan nagari
- c. Memastikan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Tim Penyusun RPJM-Nagari
- d. Memastikan tersedianya hasil-hasil MMDN dan Penggalan Gagasan tahun sebelumnya sebagai informasi dan bahan pendukung pelaksanaan pengkajian keadaan nagari
- e. Menetapkan jadwal dan agenda pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM-Nagari
- f. Menyiapkan sarana, alat dan kebutuhan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM-Nagari.

BAB IV

VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF (ENAM TAHUN)

Rumusan visi dan misi digali berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat yang kemudian dirumuskan tentang visi kedepan. Sehingga rumusan visi harus sejalan dengan ciri-ciri khas atau unik masyarakat ke depan. Rumusan visi tersebut perlu dirumuskan ke dalam misi capaian program yang akan dilaksanakan diantara masyarakat Nagari. Hasil penggalan visi dan misi

4.1. Visi Wali Nagari

Visi Nagari Tluk Kualo Inderapura

” Mewujudkan masyarakat Nagari Tluk Kualo Inderapura yang mandiri, agamais,berbudaya *dan sejahtera, berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”.

4.2. Misi Wali Nagari

Misi untuk mencapai visi Nagari Tluk Kualo Inderapura antara lain :

1. Melanjutkan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan.
2. Meningkatkan Pemerataan Kualitas Pendidikan.



3. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
4. Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis Kerakyatan.
5. Melanjutkan Pembangunan Infastruktur.
6. Melanjutkan Pembangunan Agama, Adat dan Budaya.
7. Melanjutkan Pembangunan Sumber Daya Manusia, yang unggul berlandaskan moral agama.
8. Melanjutkan Pelestarian Kesenian dan Budaya serta tradisi lokal. Inderapura
9. Menciptakan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.(RPTRA) sebagai sarana dan ruang interaksi anak, pemuda dan masyarakat.

4.3. Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan

A. Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP)

Bertujuan mengurangi kemiskinan, khususnya pada petani. Program ini ditujukan kepada petani setidaknya agar petani memiliki tiga usaha selain bertani, yaitu perkebunan, peternakan maupun perikanan, dengan program-program antara lain:

1. Penyaluran Bibit dan Pupuk bagi petani
2. Bantuan Perikanan
3. Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
4. Pengolahan Industri Pangan
5. Peningkatan Program Ketahanan dan Kemandirian Pangan, serta pengembangan agribisnis kerakyatan.

B. Gerakan Terpadu Pemberdayaan Fakir Miskin.

Gerakan ini bertujuan menuntaskan kemiskinan bagi masyarakat khusus bagi kelas masyarakat yang terbawah dan sangat miskin. Antara lain :

1. Rastra
2. Pkh
3. Permodalan usaha melalui bumhag
4. Jamkesmas / Bpjs
5. Penguatan ekonomi usaha kecil
6. Pembangunan rumah tidak layak huni
7. Pembangunan Sanitasi rumah tangga fakir miskin.
8. Yandu lansia.

C. Gerakan terpadu pelestarian “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi RPJM NAGARITLUK KUALO INDERAPURA 2018-2024 Kitabullah”.



Tujuannya adalah menanamkan dan mengaplikasikan falsafah “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”.

Sebagai wujud jati diri masyarakat kembali bernagari dengan program antara lain :

1. Gerakan Shalat Berjamaah
2. Magrib Mengaji
3. Pembinaan Guru TPQ, Imam dan Khotib
4. Membina dan melestarikan kesenian dan budaya tradisional melalui sanggar – sanggar dan grup-grup kesenian tradisional
5. Pembinaan Pemuda dan Remaja Mesjid
6. Melestarikan Gema Hari Besar Islam dengan Iven Tabligh Akbar dan semarak Majelis Ta’lim.

D. Gerakan Terpadu pengembangan SDM

Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang handal, sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat dengan program – program antara lain :

1. Pelatihan kerajinan dan keterampilan bagi kaum perempuan melalui PKK, kelompo- kelompok dasa wisma maupun majelis ta’lim
2. Peningkatan kapasitas pemuda dan masyarakat melalui pelatihan padat karya seperti, pelatihan kerajinan tangan, perbengkelan, komputer teknologi tepat guna dsb.
3. Gerakan Masyarakat Membaca (GMM) dengan pola satu rumah lima buku
4. Penyelenggaraan Pendidikan Paket C
5. Peningkatan Kompetensi Guru TPA/TPSA
6. Pendidikan dan Inovasi Pertanian untuk petani

E. Gerakan Terpadu Reformasi Birokrasi

Gerakan ini bertujuan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, di antaranya dengan konsep pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan peningkan kualitas SDM aparatur pemerintahan Nagari.

F. Kebijakan Pembangunan

Dilihat dari semua segi usulan maka kebijakan pembangunan banyak diarahkan pada program Sarana dan Prasarana kemudian penambahan sumber mata Pencaharian masyarakat terutama bagi masyarakat Nelayan dan Petani.

Untuk itu kami berharap pada Pemerintah agar pada program kedepan dapat memperbanyak kegiatan berupa program – program Sarana dan

Prasarana dan penambahan sumber mata pencaharian Masyarakat terutama
RPJM NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA 2018-2024
 dibidang Perkebunan Kelapa Sawit.



Adapun kebijakan pembangunan Nagari Tluk Kualo Inderapura priode 2018-2024 mengacu kepada RPJMD Kabupten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 dengan visi dan misi Bupati Pesisir Selatan sebagai berikut:

KETERKAITAN VISI MISI KABUPATEN DENGAN VISI MISI WALI NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA

• VISI

NO	VISI KABUPATEN PESISIR SELATAN	VISI WALI NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA
1	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yg Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahterah	Mewujudkan masyarakat Nagari Tluk Kualo Inderapura yang mandiri, agamais,berbudaya <i>dan sejahtera, berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah</i>

• MISI

NO	MISI KABUPTEN PESISIR SELATAN	MISI WALI NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA
1	Melaksanakan Reformasi Birokrasi dg aparatur yg bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat	1. Melanjutkan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan.
2	Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah	5. Melanjutkan Pembangunan Infastruktur 2. Meningkatkan Pemerataan Kualitas Pendidikan. 3. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakatan
3	Meningkatakan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai nilai budaya ABS-SBK	6. Melanjutkan Pembangunan Agama, Adat dan Budaya. 7. Melanjutkan Pembangunan Sumber Daya Manusia, yang unggul berlandaskan moral agama. 8. Melanjutkan Pelestarian Kesenian dan Budaya serta tradisi lokal. Inderapura
4	meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap meningkatkan pembangunan	4. Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Pengembangan Agribisnis Kerakyatan

RPJM NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA 2018-2024



5	berkelanjutan meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang	9. Menciptakan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.(RPTRA) sebagai sarana dan ruang interaksi anak, pemuda dan masyarakat.
---	---	--

Arah kebijakan pembangunan Nagari Tluk Kualo Inderapura mengacu dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan kabupaten pesisir selatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Fisik

- a. Pembangunan Ruang Publik terpadu Ramah Anak (RPTRA)
- b. Penataan kawasan pemukiman dan jalan poros Nagari
- c. Penataan sistem drainase pemukiman
- d. Penataan jalan dan kawasan pendidikan
- e. Pembangunan gudang pengolah pupuk organik
- f. Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas umum (Pendidikan,kesehatan,social budaya,perekonomian,fasilitas ibadah,jalan Nagari dan sarana olah raga)
- g. Pembangunan rumah tidak layak huni dan jamban keluarga miskin
- h. Pembangunan pasar Nagari
- i. Pembangunan gerbang batas Nagari dan Penanda Wilayah (Gapura)
- j. Pengolahan sampah dan limbah
- k. Pembangunan jaringan irigasi pertanian dan perikanan
- l. Pembangunan dermaga pelelangan lokan (DPL)

2. Pembangunan Non Fisik

- a. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Nagari
- b. Jaminan perlindungan kesehatan Masyarakat
- c. Perlindungan kesehatan bagi ibu hamil dan anak
- d. Peningkatan kapasitas warga masyarakat khususnya pelaku usaha dan kelembagaan masyarakat
- e. Penyusunan data base Nagari dan sistim komputerasi terpadu pelayanan publik
- f. Kegiatan adat,agama,kesenian budaya,olah raga dan gerakan masyarakat berskala lokal nagari
- g. Peningkatan keterampilan ekonomi masyarakat
- h. Optimalisasi Bumrag sebagai lembaga ekonomi Nagari
- i. Program gerakan masyarakat membaca
- j. Gerakan masyarakat sehat (Germas)
- k. Produk unggulan nagari



BAB V. PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) ini disusun sebagai modal dasar untuk melakukan pembangunan yang ada di Nagari Tluk Kualo Inderapura untuk Tahun 2018 2/d 2024. Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan Nagari pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) sebagai bahan acuan pembangunan diharapkan mejadi: .

- a. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des).
- b. Pembangunan yang dilaksanakan bisa terwujud dengan berkeadilan dan pemerataan.
- c. Terjaminya kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Demikian lah penyusunan program pembangunan kami buat, semoga allah SWT memberikan rido-Nya serta kita diberi kemampuan untuk mewujudkannya. Aamiin.

Tluk Kualo Inderapura, 2018
Wali Nagari Tluk Kualo Inderapura



DEDI JOAFNALDI, S.Sos.I

Lampiran

1. Peta Sosial Nagari
2. Tabel (Matrik) Program/ Kegiatan Enam Tahun
3. Berita Acara Penyusunan RPJM dan Daftar Hadir
4. SK Tim Penyusun RPJM Nagari

RPJM NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA 2018-2024